



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 15 Mei 2017

Halaman: 2

Izin UMK Bukan untuk Agunan

YOGYA (MERAPI) - Belum semua usaha mikro kecil (UMK) di Kota Yogyakarta memiliki izin. Baru sekitar 2.000 UMK berizin dari potensi sekitar 23.468 usaha mikro kecil dan menengah yang tercatat di Kota Yogyakarta. Padahal selain legalitas, adanya izin UMK itu akan memudahkan dalam mengakses modal dari perbankan.

Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto mengatakan, sekitar 2.000 UMK yang berizin itu merupakan akumulasi sejak tahun 2016 sampai kini. Ditargetkan tahun 2017 izin UMK yang diterbitkan mencapai 1.400 UMK. "Kita targetkan 1.400 izin UMK tahun ini bisa berizin. Sekarang pelayanan perizinan UMK ada di kecamatan, sehingga jika dibagi perkecamatan setidaknya nambah 100 izin UMK," kata Tri Karyadi, Minggu (14/5).

Tri menyampaikan, adanya izin UMK itu memberikan legalitas bagi usaha mikro kecil warga. Selain itu untuk memudahkan dalam mengakses modal dari perbankan. Misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun selama ini masih ada pemahaman yang salah di masyarakat terkait izin UMK dan pinjaman modal perbankan itu.

"Banyak yang menganggap izin UMK itu sebagai agunan. Izin UMK itu ya legalitas untuk memudahkan mengakses perbankan. Tapi bukan untuk agunan," ujarnya.

Lantaran pemahaman yang salah itu upaya sosialisasi terkait izin UMK terus dilakukan. Termasuk melibatkan pendamping UMK di setiap wilayah. Apalagi sejak tahun 2016, perizinan UMK dapat dilayani di semua kecamatan di Kota Yogyakarta. Hal itu mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat.

Izin UMK itu dapat berlaku selamanya sepanjang jenis serta klasifikasi usaha tidak berubah dan tidak menimbulkan dampak lingkungan. UMK yang ada di Kota Yogyakarta di antaranya kuliner, kerajinan dan fashion. "Salah satu kecamatan yang memberikan perhatian cukup tinggi kepada UMK adalah Kecamatan Pakualaman. Kami harap kecamatan lain dapat mencontoh," ucap Tri Karyadi.

Diakuiya seiring pengurusan izin UMK dilimpahkan ke kecamatan, akses modal dari perbankan oleh pelaku UMK cenderung meningkat. Terutama dari jalur KUR. Diharapkan hal itu dapat meningkatkan pengembangan UMK di Kota Yogyakarta.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005